

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi. Hal ini tercantum dalam hasil amandemen ke-II Pasal 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sekaligus mengakui bahwa yang berkuasa adalah rakyat¹ Artinya Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, bukan negara hukum yang otoriter.²

Selain itu, penerapan sistem demokrasi juga terlihat dari adanya keterbukaan politik di Indonesia yang terjadi sejak tahun 1998, dimana adanya pelaksanaan pemilihan umum atau yang disebut dengan Pemilu.³ Pemilu merupakan sarana pengamalan demokrasi yang menjadi sarana untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin eksekutif di pusat dan daerah.

Pemilu mempunyai makna penting bagi berjalannya demokrasi, dimana setiap warga negara yang dianggap telah dewasa dan memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang dapat memilih pemimpin pemerintahan. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa perlu ikut serta mensukseskan agar mencapai hasil optimal.⁴

¹ Sunarno, Negara Hukum yang Demokratis, *Jurnal Administrasi negara*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 42

² *Ibid.*

³ Alwi Lalu Nanang, Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, *Jurnal Ilmu Politik*, Volume 1, Nomor 1, 2019, hlm. 1

⁴ Andi Faisal, *Literasi Politik dan Pelembagaan Pemilu*, (Jakarta: FIKOM UP Press, 2016), hlm.

Salah satu bentuk pemilihan umum yang dilakukan di negara Indonesia adalah Pemilu secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden atau yang biasa disebut dengan Pilpres serta pilihan calon legislatif atau disebut dengan Pileg. Pemilihan umum presiden dan legislatif adalah sebuah proses demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden serta calon-calon legislatif pada periode tertentu. Pemilu presiden dan wakil presiden serta legislatif mempunyai karakteristik sendiri dibanding dengan pemilu lainnya.⁵

Berbicara mengenai Pemilu, maka hal ini tentu berkaitan dengan politik, dimana pada pelaksanaannya politik banyak melibatkan semua kalangan, mulai dari partai politik, masyarakat umum, mahasiswa, kaum intelektual hingga kelompok-kelompok organisasi. Salah satu kelompok organisasi yang memiliki peran cukup penting dalam politik di Indonesia adalah organisasi Nahdlatul Ulama atau yang disebut dengan NU. Organisasi NU ini merupakan organisasi Islam yang terbentuk pada tanggal 31 Januari 1926 M di Kertopaten Surabaya Jawa Timur oleh para Kiai yang diketuai oleh K.H.M. Hasyim Asy'ari dan K.H. Abdul Wahab Hasbullah.⁶

Lahirnya NU ini dilatar belakangi oleh dua faktor dominan, yaitu: pertama munculnya kekhawatiran terhadap fenomena gerakan Islam Modernis yang bertendensi mengikis identitas kultural dan paham keagamaan *Ahlussunnah wal*

⁵ Eko Sutoro, *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: APMD Press, 2004), hlm. 137

⁶ Nevy Rusmarina Dewi dan Ahmad Sholahuddin, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Menjawab Tantangan Multikultural di Indonesia: Studi Kasus Papua, *Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Volume 3, Nomor 1, 2020, hlm. 64-65

Jama'ah (Aswaja) yang telah hidup dan dipertahankan selama ratusan tahun. Kedua sebagai respon terhadap pertarungan ideologis yang terjadi di dunia Islam pasca penghapusan kekhalifahan Turki Utsmani, munculnya gerakan Pan-Islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani dan gerakan Wahabi di Hijaz. Pada waktu itu pemerintah melakukan pengusiran beberapa petilasan sejarah Islam, seperti makam beberapa pahlawan Islam dengan dalih mencegah kultus individu.

Nahdlatul Ulama (NU) menjadi organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial keagamaan dengan tokoh kiai sebagai pusatnya. NU merupakan salah satu simbol kekuatan dari struktur komunitas dan spiritual yang berbasis pada tradisi pondok pesantren dan adat setempat. Hal ini sebagaimana tercantum dalam mukadimah Khittah NU tujuan berdirinya NU sebagai organisasi keagamaan adalah wadah para ulama beserta pengikutnya dengan tujuan memelihara, melestarikan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Selain itu, NU juga bertujuan menciptakan kemaslahatan masyarakat, memajukan bangsa, serta mempertinggi harkat dan martabat manusia.⁷

Substansi dalam Khittah NU dalam pedoman baku adalah paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan di Indonesia. NU sebagai organisasi Islam yang berasaskan pada Pancasila, sehingga memiliki tanggungjawab besar dalam kancah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada awal kelahirannya, NU sebagai organisasi keagamaan mengarahkan

⁷ Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2006) hlm. 15

perjuangannya pada dua sasaran yaitu mengembangkan amal ibadah dan berjuang untuk melawan kolonialisme Belanda.⁸

Pada masa penjajahan, NU secara aktif berperan melawan penjajah dan memusnahkan konsep-konsep kebangsaan sebagai dasar mendirikan negara baru. Keterlibatan NU dalam politik dimulai ketika NU dan Muhammadiyah bersama-sama membentuk Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI: Majelis Tinggi Indonesia pada tanggal 21 September 1937. Keterlibatan NU dalam MIAI membawa perubahan mendasar dalam orientasi para pemimpin NU mengenai masalah keagamaan hingga masalah politik.⁹

Pada tahun 1945, NU berperan aktif dalam Kongres Umat Islam di Yogyakarta dan membentuk Partai Islam Indonesia yang diberi nama majlis Syuro Muslimin (Mayumi). Namun 7 tahun berselang, NU mengundurkan diri dari Mayumi karena adanya konflik internal dan memproklamasikan dirinya sebagai salah satu kekuatan sosial politik di Indonesia. Hal ini yang menyebabkan hingga saat ini, banyak sekali tokoh-tokoh NU yang terlibat dalam dunia politik di Indonesia.¹⁰

Selain itu, banyak pula tokoh NU yang berhasil menduduki jabatan pemerintahan seperti tokoh NU K.H. Abdurrahman Wahid (Gusdur) yang menjadi Presiden RI tahun 1999-2001 dan saat ini ada Ma'ruf Amin yang berhasil menduduki

⁸ *Ibid.* hlm. 16

⁹ *Ibid.* hlm. 17

¹⁰ Kiavi Novia Dewi Puspitasari, Peranan Nahdlatul Ulama dalam Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Transisi Terpimpin Tahun 1959-1965, *Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 1, Nomor 2, 2016, hlm. 5

jabatan Wakil Presiden RI periode 2019-2024.¹¹ Selanjutnya ketua umum PP Fatayat NU yaitu Anggia Ermarini yang menduduki jabatan DPR RI periode 2019-2024. Kemudian Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A yang menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi RI, dimana beliau juga merupakan pengurus besar NU.¹²

Selain itu, NU juga dikenal memiliki relasi yang cukup kuat dalam partai politik seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hubungan yang terjalin antara NU dengan PKB ini adalah relasi aspiratif yaitu hubungan timbal balik antara partai dengan konstituennya. Warga NU memberikan dukungan, sedangkan PKB memperjuangkan aspirasi warga NU. Kondisi ini yang menyebabkan banyak warga NU yang berhasil menduduki posisi penting dalam pemerintahan melalui PKB, sehingga mengindikasikan bahwa warga NU ini termasuk kelompok elit politik.¹³

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam yang terbesar banyak tersebar diseluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah Provinsi Jambi. Organisasi NU di wilayah Provinsi Jambi sendiri resmi berdiri sejak tahun 1939 pada masa K.H. Kemas Abdussomad yang kerap ditarik dalam urusan politik seperti pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Tidak jarang para pengurus wilayah NU (PWNU) Provinsi Jambi beserta para kiai-kiai NU terbuka untuk ikut mendukung dan terlibat aktif dalam kegiatan kampanye salah satu calon.¹⁴

¹¹

<https://www.google.com/amp/s/nasional.sindonewas.com/newsread/767095/12/setelah-gus-dur-ini-jejak-4-tokoh-nu-di-pilpres-1652328353> diakses 30 Juni 2022

¹²<https://www.google.com/amp/s/m.jpnn.com/amp/news/pengin-tahu-berapa-kader-fatayat-nu-jadi-anggota-dpr-2019-2024> diakses 30 Juni 2022

¹³ Nurlira Goncing, Politik Nahdlatul Ulama dan Orde Baru, *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Volume 1, Nomor 1, 2015, hlm. 63

¹⁴ *Ibid.*

Nuansa politis NU cukup menonjol di wilayah Provinsi Jambi, dimana keterlibatan NU baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mensukseskan kepemimpinan kepala daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, tetapi juga merambah dalam perebutan jabatan strategis di pemerintahan.¹⁵ Tokoh-tokoh NU di Provinsi Jambi banyak yang berhasil menduduki posisi penting dalam sistem pemerintahan, seperti yang terjadi pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 lalu, dimana Abdullah Sani yang merupakan PWNU berhasil menjadi Wakil Gubernur Provinsi Jambi periode 2021-2024.¹⁶

Selain itu, tokoh-tokoh NU Provinsi Jambi sebelumnya juga sudah eksis dalam pemilu serentak tahun 2019, dimana pada saat itu Provinsi Jambi merupakan salah satu wilayah yang melaksanakan Pemilu secara serentak, termasuk dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat tingkat pusat atau yang disebut dengan DPR RI. Pada saat itu untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Jambi sendiri ada 8 calon yang berhasil duduk di kursi legislatif. Adapun calon-calon yang terpilih sebagai anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi pada Pemilu 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi Pada Pemilu 2019

No	Nama	Fraksi	Perolehan Suara
1	Hasan Basri Agus	Golkar	200.291
2	Saniatul Lativa	Golkar	85.969
3	Sutan Aidil Hendra	Gerindra	83.325
4	H. Bakri	PAN	82.447

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ <https://radardesa.co/2021/07/sekilas-sosok-wakil-gubernur-jambi-abdullah-sani/> diakses 30 Juni 2022

5	Zulfikar Ahmad	Demokrat	72.333
6	Ihsan Yunus	PDIP	76.303
7	Sofyan Ali	PKB	40.470
8	Hasbi Anshori	Nasdem	30.809

Sumber : KPU Provinsi Jambi (2019)

Dari 8 kandidat yang terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024, maka Sofyan Ali merupakan salah satu kandidat terpilih dari fraksi PKB. Pada saat itu perolehan suara Sofyan Ali memang berada pada posisi terendah kedua setelah Hasbi Anshori dari fraksi Partai Nasdem dengan perolehan suara sebesar 40.470 suara, namun perolehan suara tersebut mampu membawa Sofyan Ali menjadi anggota DPR RI.¹⁷

Sofyan Ali merupakan satu-satunya fraksi PKB Dapil Provinsi Jambi yang berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Padahal ini merupakan periode pertama Sofyan Ali maju sebagai anggota DPR RI, namun dirinya sudah berhasil menjadi anggota DPR RI. Padahal pada Pileg 2019 lalu ada 1 calon lain dari fraksi PKB yaitu Handayani yang sudah lebih dulu menduduki posisi anggota DPR RI periode 2014-2019. Adapun perbandingan perolehan suara tertinggi caleg PKB pada Pemilu 2019 sebagai berikut:

Tabel 1.2.

**Perolehan Suara Tertinggi Caleg DPR RI Fraksi PKB Dapil Provinsi Jambi
Pada Pemilu 2019**

No	Nama	Perolehan Suara
1	Sofyan Ali, S.H., M.Pd	40.470

¹⁷ <https://jambi.kpu.go.id> diakses 30 Juni 2022

2	H. Handayani, SKM., M.PH	37.479
3	H. Muhammad Fadli, S.H	26.017

Sumber : KPU Provinsi Jambi (2019)

Dari tabel di atas, maka Sofyan Ali dan Handayani memiliki suara yang lebih tinggi dibanding H. Muhammad Fadli. Hal ini dikarenakan Handayani sebelumnya sudah lebih dulu menjabat sebagai anggota DPR RI sehingga dirinya sudah memiliki relasi yang luas, sedangkan Sofyan Ali juga sudah pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Namun pada kenyataannya, pengalaman Handayani sebagai anggota DPR RI fraksi PKB periode sebelumnya tidak mampu mengalahkan perolehan suara Sofyan Ali pada pemilu 2019 lalu.¹⁸

Hal ini tentu menjadi sesuatu yang menarik, mengingat Handayani sudah lebih dulu menjadi anggota DPR RI maka kemampuan beliau tentu sudah lebih banyak dibanding Sofyan Ali yang baru pertama mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Apabila melihat dari jejak organisasi antara Sofyan Ali dengan Handayani maka terdapat beberapa perbedaan. Adapun perbedaan pengalaman organisasi antara Sofyan Ali dan Handayani sebagai berikut:

Tabel 1.3.

Rekam Jejak Organisasi Sofyan Ali dan Handayani

No	Nama	Rekam Jejak Organisasi
1	Sofyan Ali, S.H., M.Pd	1. Anggota PMII 2. Anggota IPNU 3. Wakil DPC PKB Kota Jambi

		(2001-2003) 4. Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPW PKB Provinsi Jambi (2004-2007) 5. Sekretaris DPW PKB Provinsi Jambi (2007-2011) 6. Ketua DPW PKB Provinsi Jambi (2013-sekarang) 7. Dewan penasehat ISNU dan Dewan Pembina Ansor 8. Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. ¹⁹
2	H. Handayani, SKM., M.PH	1. Calon Bupati Merangin pada Pilkada 2013 2. Anggota DPR RI Komisi IX periode 2014-2019 3. Mantan PNS di Pemda Jambi 4. Kasubbag Kepegawaian Dinas Kesehatan Merangin 5. Ketua Yayasan Stikes Merangin. ²⁰

Sumber : Link Berita Rekam Jejak Caleg PKB (2022)

Berdasarkan rekam jejak organisasi Sofyan Ali juga tidak kalah menarik dari Handayani, dimana selain pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, Sofyan Ali juga terkenal aktif dalam organisasi, baik organisasi partai politik maupun organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama atau yang biasa disebut dengan NU. Sofyan Ali sendiri sendiri merupakan anggota Ikatan Pemuda

¹⁹ <https://www.dpr.go.id> diakses 30 Juni 2022

²⁰ <https://anggota-pkb-handayani-dprd-ri-2014-2019-profil/5403631742b53eac2f8ef6b2> diakses 30 Juni 2022

Nahdlatul Ulama (NU) dan tahun 2017 lalu menjadi dewan penasehat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) dan penasehat Ansor yang merupakan salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama.

Keaktifan Sofyan Ali dalam organisasi NU ini sejalan dengan keputusannya untuk bergabung dalam partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dimana PKB ini merupakan partai politik yang berideologi Pancasila, Demokrasi Islam, Liberalisme dan Pluralisme, sehingga PKB tidak hanya berpandangan pada politik, tetapi juga pada syariat Islam.

Hal ini dikarenakan PKB merupakan partai besar yang berdiri karena adanya usulan dari warga nahdliyin pada organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan berlandaskan sifat kejuangan, terbuka, kebangsaan dan demokratis. Deklarasi pembentukan PKB sendiri dilakukan dikediaman ketua PB NU yaitu Gus Dur pada tanggal 23 Juli 1998.²¹ Hal ini yang menyebabkan PKB identik dan memiliki keterkaitan dengan Nahdlatul Ulama (NU).

Nahdlatul Ulama atau NU sendiri merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang ikut bertanggungjawab untuk memberikan kontribusinya dalam mewujudkan cita-cita keadaban bangsa. Eksistensi NU sebagai organisasi besar memiliki komunikasi politik yang layak untuk diperhitungkan. Meskipun NU bukan merupakan partai politik, tapi NU merupakan organisasi organisasi politik atau

²¹ Nevy Rusmarina Dewi dan Ahmad Sholahuddin, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Menjawab Tantangan Multikultural di Indonesia: Studi Kasus Papua, *Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Volume 3, Nomor 1, 2020, hlm. 64-65

organisasi sosial kemasyarakatan yang mau tidak mau harus berpolitik, sehingga dari NU ini lahirlah partai-partai politik.²²

Dari hal tersebut, maka peluang keterpilihan Sofyan Ali sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 memiliki indikasi berkaitan dengan keaktifannya dalam organisasi NU dan peran dari PKB. Mengingat NU sebagai organisasi Islam yang dominan di Provinsi Jambi, sehingga keaktifan Sofyan Ali dalam organisasi NU tentu menjadi potensi tersendiri bagi dirinya. Hal ini dikarenakan berdasarkan informasi awal yang diperoleh bahwa NU turut serta untuk memberikan usulan bakal calon yang akan maju dalam pemilihan legislatif tahun 2019 lalu. Pada hal ini, NU memberikan saran dan persetujuan kepada Sofyan Ali agar mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada tahun 2019 lalu. Oleh karena itu, guna mengetahui lebih lanjut mengenai pengaruh NU terhadap kemenangan Sofyan Ali dalam Pemilu 2019 lalu. Keterpilihan Sofyan Ali sebagai anggota DPR RI diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Provinsi Jambi sebagai penyalur aspirasi antara pemerintah dengan masyarakat Jambi.

Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

Penelitian Sanusi dan Gumilar yang berjudul “Peran Ma’ruf Amin dalam Meraih Suara Masyarakat Muslim pada Pemilihan Presiden 2019”. Metode penelitian adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi Ma’ruf Amin sebagai pendamping Jokowi menjadi daya tarik tersendiri karena Ma’ruf Amin merupakan

²² Masmuni Mahatma, Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bernegara, *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Volume 8, Nomor 1, 2017, hlm. 33

ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Rais Am Nahdlatul Ulama yang cukup diperhitungkan dikancah politik Indonesia, sehingga keberadaan Ma'ruf Amin dapat menarik simpatisan untuk mendukung Jokowi dan Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 lalu.²³

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama ingin mengetahui peran dari kelompok elit terhadap kemenangan salah satu kandidat. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus pada Ma'ruf Amin sebagai kelompok elit, sedangkan pada penelitian ini fokusnya adalah Nahdlatul Ulama (NU).

Penelitian Saputra dengan judul “Peran Politik NU dalam Pemenangan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyatmoko dalam Pilkada Banyuwangi”. Metode penelitian adalah kualitatif dengan hasil penelitian adanya peran NU yang mendominasi pemikiran masyarakat dalam memilih anggota NU sebagai pimpinan daerah. Peran NU dalam hal ini adalah berinisiatif mencalonkan Abdullah Azwar Anas, para kyai sebagai konsekuensi kemenangan calon dan merekam aspirasi ijtihad politik PCNU untuk memilih calon kader yang maju dalam Pilkada.²⁴

Persamaan penelitian Saputra dengan penelitian ini adalah sama-sama ingin mengamati peran NU terhadap kemenangan salah satu calon dalam pemilihan umum. Perbedaannya adalah fokus penelitian, dimana penelitian Saputra fokus pada kemenangan calon kepala daerah, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada kemenangan anggota legislatif.

²³ Ahmad Sanusi dan Galih Gumilar, Peran Ma'ruf Amin dalam Meraih Suara Masyarakat Muslim pada Pemilihan Presiden 2019, *Jurnal Ilmu Politik*, Volume III, Nomor 1, 2019

²⁴ Tulus Bima Saputra, Peran Politik NU dalam Pemenangan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyatmoko dalam Pilkada Banyuwangi, *Jurnal Politik*, Volume 1, Nomor 1, 2017

Selanjutnya penelitian Nurdyansyah yang berjudul “Komunikasi Politik Patronase NU dalam Pilkada Kabupaten Purbalingga 2020”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa patron NU dalam memilih calon kandidat yang diusung PKB dalam Pilkada Purbalingga tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh kualitas tokoh NU dalam bermasyarakat dan berpolitik.²⁵

Persamaan penelitian Nurdyansyah dengan penelitian ini adalah sama-sama ingin mengetahui peran Nu dalam politik, perbedaannya hanya pada penelitian terdahulu peran NU lebih diarahkan pada komunikasi politik yang dilakukan dalam Pilkada, sedangkan pada penelitian ini peran NU dilihat secara umum bukan hanya komunikasi politik dalam mendukung kemenangan calon legislatif.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Peran Nahdlatul Ulama dalam Keterpilihan Sofyan Ali Sebagai Anggota DPR RI Periode 2019-2024”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana peran Nahdlatul Ulama dalam keterpilihan Sofyan Ali sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024?
2. Apa saja faktor pendukung keterpilihan Sofyan Ali sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

²⁵ Muhammad Nurdyansyah, Komunikasi Politik Patronase NU dalam Pilkada Kabupaten Purbalingga 2020, *Jurnal Dialektika Komunika*, Volume 9, Nomor 1, 2021

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Nahdlatul Ulama dalam keterpilihan Sofyan Ali sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung keterpilihan Sofyan Ali sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah dan informasi tambahan bagi penelitian selanjutnya terkhusus bagi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi organisasi dapat dijadikan sebagai acuan pengaruh Nahdlatul Ulama dalam politik.
- b. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai referensi mengenai pengaruh Nahdlatul Ulama dalam pemilu.

1.5. Landasan Teoritis

1.5.1. Elit Politik

Berdasarkan teori Anthony Giddens, elit politik dapat diartikan sebagai kelompok minoritas yang terdiri dari beberapa orang yang berkuasa dan memiliki kekuasaan politik dalam masyarakat. Melalui kedudukannya itu, mereka dapat

memengaruhi perkembangan masyarakat dalam hubungan yang sifatnya timbal balik.²⁶

Berdasarkan teori Karl Mark yang dikutip dari Varma menyatakan bahwa elite politik sendiri dibagi menjadi dua bagian diantaranya elite politik lokal dan elite non politik non lokal, elite politik lokal adalah merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Elite Non Politik Lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elite non politik ini seperti: elite keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya.²⁷

Elit lokal merupakan aliansi dari orang yang dinilai pintar dan mempunyai pengaruh didalam masyarakat, misalnya para tokoh masyarakat, pemuka agama, dan orang-orang yang mempunyai kemampuan financial yang relatif tinggi dibanding masyarakat umum.²⁸

Elit politik juga dapat diartikan sebagai kelompok yang memegang peranan penting terhadap kepemimpinan maupun keterpilihan seseorang dalam dunia politik. Elit politik ini selain berperan sebagai pendukung, juga ada yang berperan sebagai pembisik, dimana elit politik yang mengeluarkan ide, mengatur bahkan apapun yang

²⁶ HM, Nasruddin Anshoriy Ch, *Bangsa Gagal Mencari Identitas Kebangsaan*, (Yogyakarta: LKIS, 2008), hlm. 4

²⁷ S.P. Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 203

²⁸ Koirudin, *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia "Format Masa Depan Otonomi Daerah Menuju Kemandirian Daerah"*, (Malang: Averroes Press, 2015), hlm. 24

dilakukan harus melalui persetujuan elit politik. Semakin berkuasa seseorang, maka semakin banyak pembisik yang datang dan juga lebih beragam. Motif para pembisik yang merupakan kelompok elit politik ini cukup beragam, mulai dari ingin menyelamatkan pemimpin, pemerintahan sampai dengan menyelamatkan kepentingan si pembisik tersebut.²⁹

Sebenarnya tidak ada yang salah apabila elit politik ingin menjadi kelompok pembisik, karena negara ini adalah negara demokratis, semua pihak bebas untuk mempengaruhi pengambil kebijakan. Mempengaruhi pemimpin ataupun pengambil kebijakan bukan tindakan kriminal, bahkan merupakan aksi politik tingkat tinggi yang akan dilakukan hampir oleh semua politisi jika memiliki kesempatan. Tapi kesalahannya adalah pengambil kebijakan tidak memiliki *filter* untuk menyaring mana pengaruh yang berguna dan mana pengaruh yang justru menjerumuskan dirinya dan kepentingan rakyat.³⁰

Ada beberapa pendekatan yang digunakan oleh para elit politik untuk mempengaruhi seseorang. Adapun pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:³¹

- a. Perspektif psikologis, dimana setiap masyarakat diperintah oleh kelompok kecil yang mempunyai kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial politik yang penuh.

²⁹ Denny J.A, *Manuver Elit, Konflik dan Konservatisme Politik*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2004), hlm. 20

³⁰ *Ibid.* hlm. 21

³¹ Abdul Chalik, *Pertarungan Elit dalam Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 28

- b. Pendekatan organisasi, dimana setiap masyarakat terdapat dua kelas penduduk yaitu kelas yang menguasai dan kelas yang dikuasai.
- c. Pendekatan ekonomi, dimana masyarakat pada dasarnya terikat oleh sesuatu kekuatan yang dapat memberikan posisi dominan dikelasnya.
- d. Pendekatan institusi ditandai dengan adanya peran institusi yang dapat mengantarkan seseorang memperoleh kekuasaan puncak.

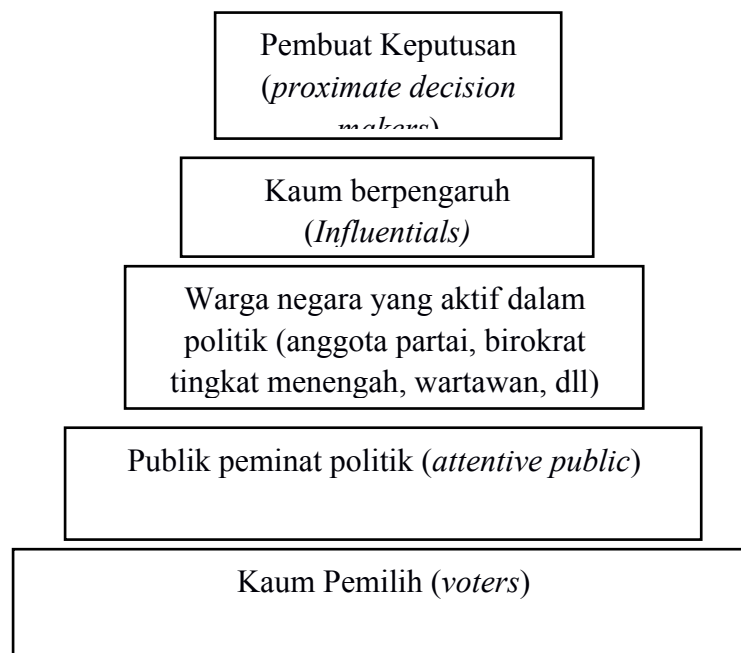
Pada prakteknya, kekuasaan politik oleh kelompok elit dapat diibaratkan sebuah pyramid yang terdiri dari beberapa lapisan, diantaranya adalah:³²

- a. Stratifikasi teratas adalah kelompok pembuat keputusan yang terdiri dari orang-orang yang menduduki jabatan resmi utama.
- b. Kaum pengaruh yaitu individu yang memiliki pengaruh tidak langsung atau implicit yang kuat, mereka yang dimintai nasehat oleh pembuat keputusan yang berkepentingan dan pendapatnya diperhitungkan. Bagian ini diisi oleh para birokrat, tuan tanah, industrialis, banker, pimpinan kelompok kepentingan, konsultan resmi dan tidak resmi.
- c. Warga negara yang mengambil bagian aktif dalam kehidupan politik dan pemerintahan, seperti anggota partai, anggota birokrat tingkat menengah, editor surat kabar atau para penulis.
- d. Lapisan keempat terdapat orang-orang yang menganggap kehidupan politik seperti halnya tontonan yang sangat menarik. Mereka disebut publik peminat politik.

³² *Ibid.* hlm. 38-39

- e. Lapisan kelima adalah kaum pemilih yang menjadi sumber politik kolektif penting, dimana jumlahnya sangat besar tetapi sebagai individu mereka tidak memiliki pengaruh sama sekali

Berdasarkan teori tersebut, maka stratifikasi yang menggambarkan tingkat pengaruh elit politik dalam kekuasaan sebagai berikut:



Gambar 1.1. Stratifikasi Pengaruh Elit Politik (Sumber : Abdul Chalik, 2017)

Selanjutnya keterlibatan para elit politik juga beranekaragam, dimana secara umum bentuk keterlibatan para kaum elit dalam politik sebagai berikut:

- a. Terlibat secara langsung sebagai pengurus parpol.
- b. Mendukung atau mendelegasikan seseorang sebagai pengurus aprpol atau partisipan politik.
- c. Mendorong keluarga dekat untuk maju sebagai partisipan politik.
- d. Mendorong seseorang yang dekat dengannya untuk menduduki jabatan politis.
- e. Mendorong orang lain asal dapat dikendalikan dan bisa bekerja sama.³³

Keterpilihan seseorang pada jabatan politik juga dapat disebabkan karena adanya faktor, salah satunya adalah faktor kekuasaan. Hal ini dikarenakan kekuasaan yang dimiliki seseorang menyebabkan seseorang tersebut memiliki banyak sumber daya yang mendukung keterpilihannya.³⁴

Berdasarkan teori Foucault, kekuasaan dipandang sebagai istilah yang digunakan untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat. Kekuasaan dapat dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan yang mempunyai ruang lingkup strategis.³⁵ Selanjutnya berdasarkan teori Foucault yang dikutip dari Muslim Mufti menyebutkan bahwa ada dua bentuk kekuasaan yang menyebabkan keterpilihan seseorang anggota kelompok elit dalam suatu jabatan politik, yaitu:

³³ *Ibid.* hlm. 56

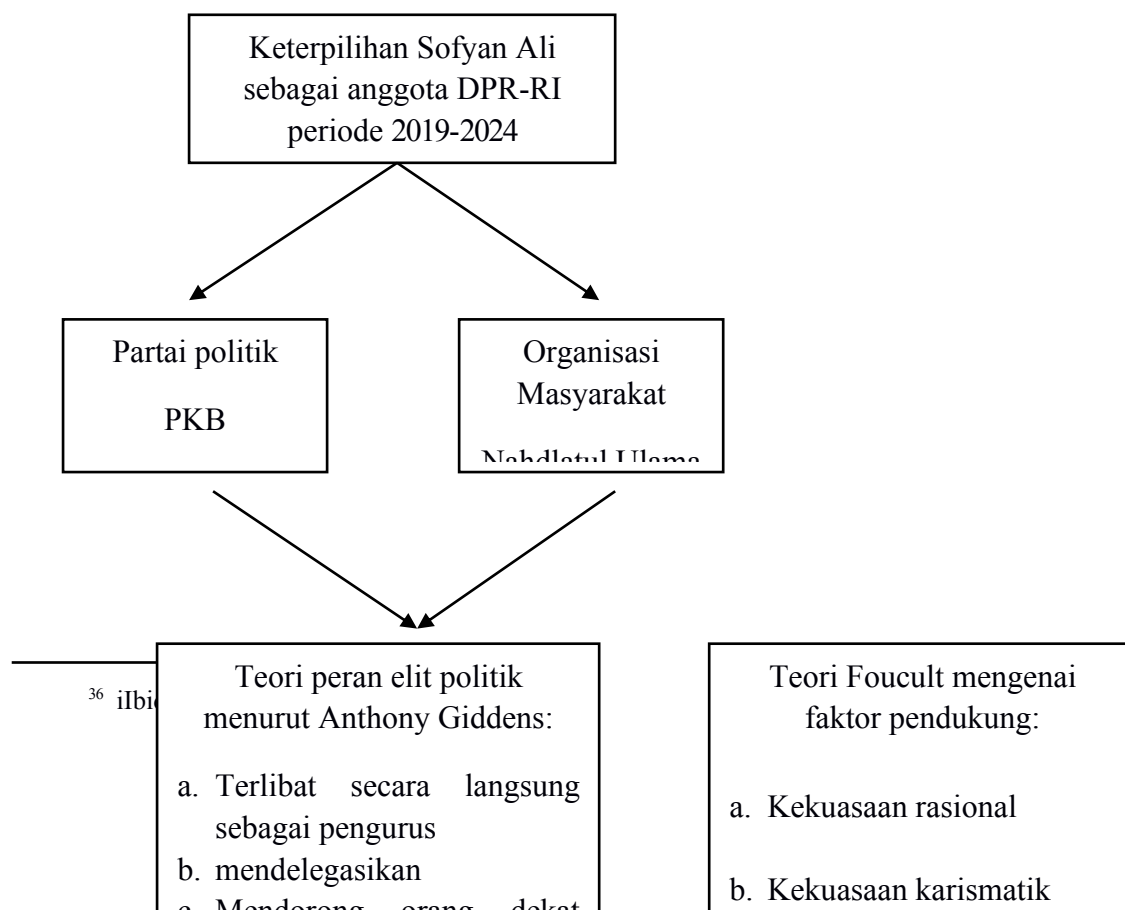
³⁴ Muslim Mufti, *Teori-Teori Politik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019). hlm. 53

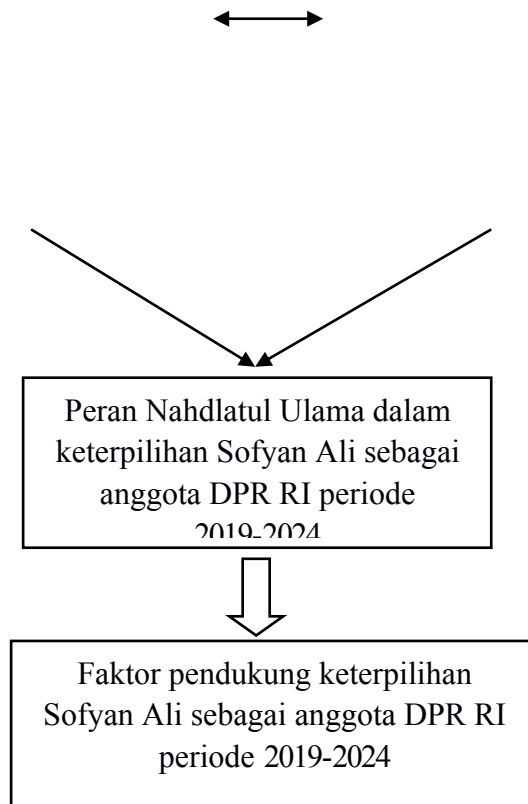
³⁵ *Ibid.*

- a. Kekuasaan rasional yaitu kekuasaan didasarkan pada peraturan yang ada di tempat ia memiliki posisi tersebut, seperti pemimpin atau posisi-posisi tertentu yang lebih diprioritaskan.
- b. Kekuasaan karismatik didasarkan pada mutu luar biasa yang dimiliki pemimpin sebagai pribadi yang memiliki daya tarik, seperti pemimpin yang aktif terlibat dalam organisasi, masyarakat dan lain sebagainya.³⁶

1.6. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:





Gambar 1.2. Kerangka Pikir

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis telaah atau teliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari

partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.³⁷

1.7.2. Lokasi/Objek Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakan penelitian. Lokasi penelitian ini adalah kantor PWNU Provinsi Jambi dan DPW PKB Provinsi Jambi. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja karena PWNU Provinsi Jambi merupakan kantor organisasi NU yang mengurus wilayah Provinsi Jambi, sedangkan kantor DPW PKB Provinsi Jambi merupakan partai politik yang mendukung Sofyan Ali.

1.7.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait situasi sosial. Penentuan fokus didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan)”. Fokus penelitian yang diperoleh setelah peneliti melakukan penjelajahan umum, dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan terhadap situasi sosial.³⁸

Fokus dari penelitian ini adalah peran Nahdlatul Ulama dalam keterpilihan Sofyan Ali sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024, serta faktor pendukung keterpilihan Sofyan Ali sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.

1.7.4. Sumber Data

³⁷John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 4-5.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 209.

Sumber data mengemukakan tentang sumber data yang dipergunakan dalam kegiatan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini membutuhkan beberapa informasi dari pihak-pihak yang terkait dalam pengumpulan data. Secara garis besar sumber data dalam penelitian ini akan dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁹ Data yang secara langsung bisa didapatkan oleh peneliti yang diperoleh dari subjek dan informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁴⁰ Data yang dikumpulkan oleh peneliti ini menjadi penunjang dari data primer, sumber data ini bisa diperoleh dari buku, jurnal, dokumen-dokumen atau laporan dan lain sebagainya.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

³⁹*Ibid*, hlm. 225

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 225.

Teknik penentuan informan ialah metode yang digunakan oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapa yang akan menjadi sumber data (informan). Penelitian kualitatif tidak menggunakan sampel oleh karena itu informan yang digunakan berdasarkan pada keterlibatan seorang informan terhadap objek penelitian yang akan diteliti.

Teknik sampling yang digunakan ialah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang digunakan adalah pihak-pihak yang paham dengan peran Nahdlatul Ulama dalam keterpilihan Sofyan Ali sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024, serta faktor pendukung keterpilihan Sofyan Ali sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Berdasarkan hal tersebut, maka informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Sekretaris PWNU Provinsi Jambi sebanyak 1 orang.
- b. Ketua dan Sekretaris DPW PKB Provinsi Jambi sebanyak 2 orang.
- c. Pengamat politik Kota Jambi 1 orang

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik

tertentu. Melalui wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.⁴¹

b. Observasi

Observasi atau pengamatan berarti memperhatikan fenomena dilapangan melalui kelima indra (penglihatan, sentuhan, pendengaran, penciuman, dan perasa) peneliti sering kali dengan instrumen atau perangkat, dan merekamnya untuk tujuan ilmiah. Pengamatan tersebut didasarkan pada tujuan riset dan pertanyaan riset.⁴² Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.⁴³

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Bahan dokumen terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data server dan flashdisk data tersimpan di website dan lain-lain.⁴⁴ Adapun dokumentasi yang dimaksud pada penelitian ini yaitu seperti foto, daftar hadir, laporan kegiatan, dokumen, dan lain-lain.

1.7.7. Teknik Analisis Data

⁴¹*Ibid.*, hlm.231-232

⁴²John W. Cresswell, *Op. Cit*, hlm. 231.

⁴³Sugiyono, *Op.Cit*, hlm. 226.

⁴⁴ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014), hlm. 33.

Peneliti melakukan analisis dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

- a. Pengumpulan Data, data dikumpulkan diawali dengan observasi yang dilakukan di lokasi penelitian yaitu Desa Pelakar Jaya. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan wawancara dengan informan penelitian. Peneliti juga mengambil dokumentasi untuk mendukung data penelitian.
- b. Reduksi Data, mereduksi data adalah pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari wawancara setelah melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan reduksi data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang berkaitan dengan penyediaan dan upaya peningkatan aksesibilitas yang disediakan.
- c. Penyajian Data, penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan apa yang dilakukan selanjutnya.
- d. Penarikan Kesimpulan, kesimpulan merupakan langkah akhir dalam suatu penelitian. Kesimpulan membantu untuk mencari dan memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini maka akan disampaikan jawaban mengenai rumusan masalah.

1.7.8. Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Triangulasi adalah suatu pendekatan riset yang memakai suatu kombinasi lebih dari satu strategi dalam suatu penelitian untuk menjangkau data/informasi. Dalam penelitian dapat dipergunakan 4 jenis triangulasi, yaitu:⁴⁵

1. Triangulasi Kejujuran Peneliti

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti dilapangan. Hal ini perlu dilakukan triangulasi terhadap peneliti, yaitu meminta bantu peneliti lain melakukan pengecekan langsung, wawancara ulang, serta merekam data yang sama dilapangan. Hal ini adalah sama dengan proses verifikasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti.

2. Triangulasi dengan Sumber Data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan. Penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden, mengoreksi kekeliruan oleh sumber data, menyediakan tambahan informasi secara sukarela, memastikan informan dalam kanvas penelitian, menciptakan kesempatan mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data menilai kecakupan menyeluruh data yang dikumpulkan.

3. Triangulasi dengan Metode

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat

⁴⁵ J.W. Creswell, *Op. Cit.* hlm. 254

dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi ketika di interview. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika di interview dan observasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda.

4. Triangulasi dengan Teori

Triangulasi dengan teori berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa dengan derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Hal ini dapat dilakukan sebagai pembanding teori dengan menyertakan usaha pencarian teori dengan cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang mungkin mengarahkan pada upaya penemuan penelitian yang lebih relevan.